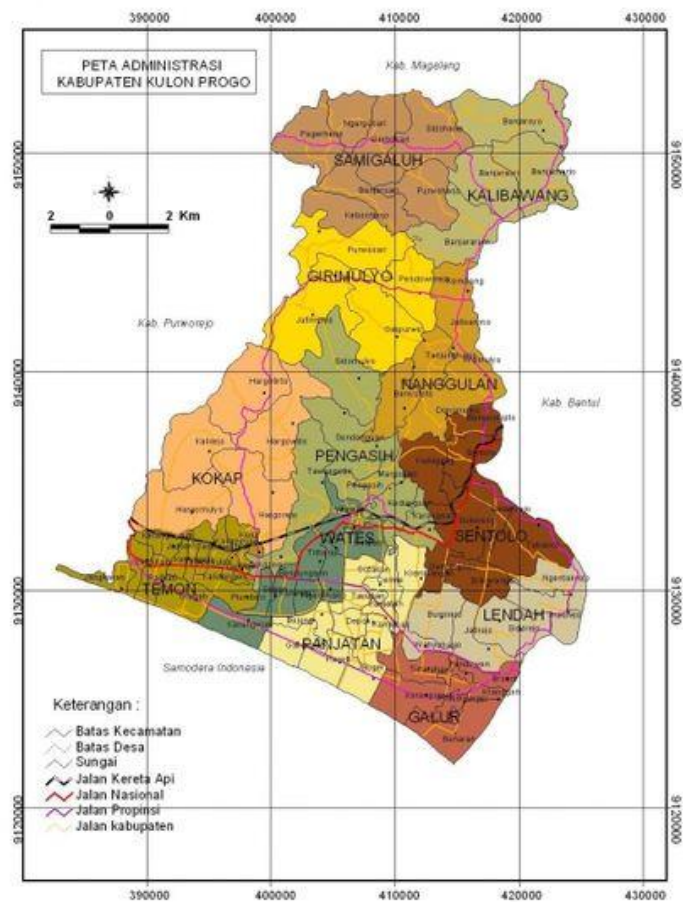


BAB II

OBJEK PENELITIAN

B. Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo



Sumber data : Geoportel Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu daerah yang terletak di bagian barat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah perbatasan Kabupaten Kulon Progo di sebelah timur yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

Wilayah perbatasan Kabupaten Kulon Progo di sebelah barat yaitu Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah perbatasan Kabupaten Kulon Progo di sebelah utara yaitu Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan wilayah perbatasan Kabupaten Kulon Progo di sebelah selatan yaitu Samudera Hindia.

Luas Kabupaten Kulon Progo adalah 586,27 Km² atau memiliki lahan 58.627 hektar serta terdiri dari 12 Kecamatan, 88 Kelurahan, dan 930 Pedukuhan. Garis koordinat lokasi 7°38'42" - 7°59'3" Lintang Selatan dan 110°1'37" - 110°16'26" Bujur Timur. Populasi penduduk di Kabupaten Kulon Progo berjumlah 470.520 jiwa, dengan kepadatan penduduk 802,57 jiwa/Km². Sistem pemerintahan berpusat di Kecamatan Wates yang berjarak sekitar 25 km di sebelah barat daya pusat Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Table.1.8. Luas Wilayah, Jumlah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Temon	36,30	26.434	726
2.	Wates	32,00	47.354	1480
3.	Panjatan	44,59	35.715	801
4.	Galur	32,91	30.777	935
5.	Lendah	35,59	38.897	1.093
6.	Sentolo	52,65	47.817	908
7.	Pengasih	61,66	48.631	789
8.	Kokap	73,80	31.908	432
9.	Girimulyo	54,90	22.532	410
10.	Nanggulan	39,61	29.089	734
11.	Kalibawang	52,96	27.633	522
12.	Samigaluh	69,29	25.915	374
Total		586,28	412.611	704

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo

Menurut data kecamatan berdasarkan karakteristik Luas Wilayah, Jumlah, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kulon Progo adalah Kecamatan dengan kepadatan penduduk yaitu Kecamatan Wates yang berjumlah 1.480 jiwa per km² dengan luas wilayah 32,00 km² dan jumlah penduduk 47.345 jiwa. Kemudian oleh Kecamatan Lendah dengan tingkat kepadatan penduduk yang berjumlah 1.093 jiwa per km² dengan luas wilayah 35,59 km² dan jumlah penduduk 38.897 jiwa. Sedangkan, Samigaluh adalah kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah yang berjumlah 374 jiwa per km² dengan luas wilayah 69,29 km² dan jumlah penduduk 25.915 jiwa.

**Table.1.9. Lapangan Kerja dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2015**

No.	Jenis Lapangan Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Pertanian	37,68	37,96	37,81
2.	Pangan	2,14	0,31	1,32
3.	Pertambangan dan Galian	11,50	18,97	14,84
4.	Industri	0,22	0,00	0,12
5.	Listrik, Gas, dan Air	13,56	0,58	7,75
6.	Konstruksi	16,33	24,59	20,02
7.	Perdagangan	3,00	0,00	1,66
8.	Komunikasi	3,50	1,38	2,55
9.	Jasa Keuangan	12,07	16,21	13,93

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo

Menurut data lapangan usaha dan jenis kelamin di Kabupaten Kulon Progo bahwa lapangan kerja yang banyak diminati oleh penduduk Kulon Progo dari perspektif gender laki-laki dan perempuan menunjukkan adalah bidang pertanian. Lapangan kerja bidang pertanian dari perspektif gender laki-laki sebesar 37,68 %, sedangkan 37,96 % untuk persepektif gender perempuan. Kemudian jenis

lapangan kerja yang tidak dimintai oleh penduduk di Kabupaten Kulon Progo adalah bidang industri. Lapangan kerja bidang industri dari perspektif gender laki-laki sebesar 0,22 % sedangkan 0 % untuk perspektif gender perempuan.

Table.1.10. Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2015

No.	Lapangan Usaha	2014	2015
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.442.659.90	1.579.969.20
2.	Pertambangan dan Penggalian	101.818.10	209.892.10
3.	Industri Pengolahan	870.617.70	918.051.60
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	4.351.80	4.474.10
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.007.70	10.522.20
6.	Konstruksi	597.695.70	651.776.40
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	913.413.40	993.190.00
8.	Transportasi dan Pergudangan	593.001.40	636.391.40
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	267.891.20	296.720.50
10.	Informasi dan Komunikasi	364.480.90	382.516.60
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	228.910.70	255.816.30
12.	Real Estate	233.583.00	256.043.70
13.	Jasa Perusahaan	20.295.80	22.111.90
14.	Admin Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	615.523.00	684.126.50
15.	Jasa Pendidikan	404.065.80	461.610.90
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100.500.00	112.613.00
17.	Jasa Lainnya	260.000.00	286.474.80
18.	PDRB	7.028.816.20	7.762.301.20
19.	Penduduk Pertengahan Tahun	405.450	408.947
20.	PDRB Per Kapita	17.345.594	18.736.661

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo

Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Kulon Progo merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi di suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Kulon Progo dihitung

menggunakan harga berlaku dan harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku adalah jumlah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun 2013-2015. Sedangkan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan adalah jumlah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan tahun berlakunya saat ini.

Kondisi ekonomi berdasarkan data Produk Domestik Bruto di Kabupaten Kulon Tahun 2013-2015 menunjukkan bahwa lapangan usaha yang terbesar diminati dan paling dominan berperan dalam meningkatkan PRDB di Kabupaten Kulon Progo adalah Lapangan usaha pertanian, perkebunan, dan perikanan. Data ini dibuktikan dengan meningkatnya hasil dari lapangan usaha Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan dari tahun 2013-2015. Pada tahun 2013 Produk Domestik Regional Bruto sebesar Rp. 1.373.635,00 juta. Sedangkan, pada Tahun 2013 Produk Domestik Regional Bruto sebesar Rp. 1.442.659,90 juta. Kemudian, pada tahun 2015 Produk Domestik Regional Bruto sebesar Rp. 1.579.969,20 juta.

Karakteristik Geografi Kabupaten Kulon Progo terbagi menjadi 3 wilayah yaitu kawasan utara, kawasan tengah, dan kawasan selatan. Berikut tinjauan mengenai topografi Kabupaten Kulon Progo :

- 1.) Kawasan utara Kabupaten Kulon Progo adalah dataran tinggi dan perbukitan Menoreh dengan ketinggian 500-1000 meter di atas permukaan laut. Kawasan utara ini Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kokap, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan

Samigaluh. Wilayah ini digunakan sebagai budidaya konservasi, pertanian, dan wisata.

- 2.) Kawasan tengah Kabupaten Kulon Progo adalah daerah perbukitan dengan ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut. Kawasan tengah meliputi Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, dan Kecamatan Lendah. Wilayah ini memiliki lereng 2,15 % yaitu dataran rendah dan perbukitan. Selain itu, wilayah ini digunakan sebagai sentral industri dan pertanian.
- 3.) Kawasan selatan Kabupaten Kulon Progo adalah dataran rendah 0-100 meter di atas permukaan laut. Kawasan selatan meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur. Kawasan ini memiliki wilayah pantai sepanjang 24,9 Km. Wilayah ini digunakan sebagai pusat administratif pemerintah daerah.

Kabupaten Kulon Progo memiliki sarana dan prasarana perhubungan yaitu jalur darat, udara, dan laut. Akses sarana dan prasarana perhubungan jalur darat Kabupaten Kulon Progo adalah Stasiun Wates Terminal Wates. Selain itu, adanya perlintasan jalan nasional sepanjang 28, 57 Km dan jalur kereta api sepanjang 25 Km. Akses perhubungan jalur udara Kabupaten Kulon Progo adalah Bandar Udara Internasional Yogyakarta. Akses perhubungan jalur laut Kabupaten Kulon Progo adalah Pelabuhan Tanjung Adikarta.

C. Gambaran Formulasi Kebijakan Perlindungan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kulon Progo

Pembangunan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo merupakan usaha pemerintah dalam menggali potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) untuk kepentingan perekonomian masyarakat. Industri kreatif di Kabupaten Kulon Progo tergolong cukup baik dalam menumbuh kembangkan minat wirausaha masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah peminat industri kreatif di tempat pusat-pusat keramaian yang berjumlah 829 usaha. Komoditas UMKM yang mendominasi di sektor ekonomi kreatif yaitu industri kuliner dengan jumlah persentase 46,68 %.

Kebijakan publik adalah suatu proses tata pemerintahan dan administrasi pemerintah yang menghasilkan keputusan pemerintah. Tahapan kebijakan publik adalah agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring kebijakan. Salah satu tahapan yang digunakan untuk perumusan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 di Kabupaten Kulon Progo adalah Formulasi Kebijakan. Formulasi kebijakan adalah tahapan kebijakan publik yang digunakan untuk merumuskan masalah, menyusun agenda kebijakan, pemilihan alternatif pemecahan masalah, dan penetapan kebijakan

Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2011 ditetapkan

pada tanggal 23 September 2011. Peraturan Daerah ini mengatur tentang kebijakan perlindungan usaha, perusahaan (*Corporate*), badan usaha, dan perdagangan. Peraturan Daerah (PERDA) ini menjelaskan bahwa berkembang dan meluasnya pusat perbelanjaan dan toko modern, maka pasar tradisional dan UMKM perlu adanya jaminan perlindungan agar dapat tumbuh serta berkembang secara serasi, sinergi, berdaya guna, dan bersaing secara sehat.

Table.1.11. Data Pasar dan Jumlah Pedagang di Kabupaten Kulon Progo

No.	Nama Pasar	Jumlah Pedagang			
		Kios	Los	Pelataran	Total
1.	Kasih	0	58	65	123
2.	Brosot	15	162	140	317
3.	Kranggan	28	309	265	612
4.	Sewugalur	0	138	156	294
5.	Bangeran	3	100	55	158
6.	Potogaten	0	151	146	297
7.	Panjatan	0	14	21	35
8.	Ngebung	0	0	100	100
9.	Ngaglik	0	64	107	171
10.	Gejlik	0	0	78	78
11.	Bendungan	166	453	153	772
12.	Temon	16	69	117	202
13.	Glaeng	3	84	133	220
14.	Pripih	0	189	61	250
15.	Jombokan	41	103	162	306
16.	Condongsari	0	14	6	20
17.	Wates	151	540	389	1080
18.	Burung	16	18	175	209
19.	Kelapa	58	19	6	83
20.	Rumput	0	7	157	164
21.	Sentolo	98	101	32	231
22.	Nganggrung	0	36	63	99
23.	Pengasih	23	9	248	280
24.	Clereng	0	29	231	260
25.	Menguri	0	32	70	102

26.	Niten	0	50	78	128
27.	Samigaluh	11	54	104	169
28.	Kenteng	21	220	391	632
29.	Nanggulan	11	73	95	179
30.	Dekso	46	119	309	474
Jumlah		717	3215	4113	8045

Sumber data : Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo melakukan pembangunan ekonomi yang diiringi tindakan preventif dari aparaturnya secara terarah kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya mengoptimalkan produktivitas industri kreatif, UKM, dan kerajinan rumah tangga. Peran pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo.

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 14 Huruf C menjelaskan bahwa “Toko Modern yang berstatus waralaba dan/atau berstatus cabang tidak boleh berjarak kurang dari 1.000 m (seribu meter) dengan Pasar Tradisional”. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2011 merupakan kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo. Konsekuensi ditetapkannya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2011 adalah pendirian toko modern yang berjarak 1.000 meter dari pasar tradisional harus tutup beroperasi atau diambil alih (*take over*) oleh Koperasi.

Salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo adalah merevitalisasi tata ruang pasar tradisional menjadi lebih modern serta layak bagi peminat industri UMKM. Selain itu, kebijakan ini

akan mempermudah akses transaksi jual beli antara pedagang dengan konsumen saat berbelanja. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2011 Pasal Pasal 4 Ayat 1 menjelaskan bahwa “Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada Pasar Tradisional dan pelaku usaha di dalamnya”. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) tersebut, pemerintah daerah berperan untuk memberikan peraturan hukum (*rule of law*) dan meningkatkan daya saing produk UMKM dengan toko modern. Diharapkan masyarakat daerah Kabupaten Kulon Progo lebih mencintai dan tertarik untuk menggunakan produk-produk lokal asli daerah.

Table.1.12. Data Perkembangan Usaha Mikro (UMi) Tahun 2016

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2016	
			Jumlah	Pangsa %
1.	<i>Usaha Mikro (Umi)</i>	<i>Unit</i>	60.853.578	98,71

Sumber data : Kementerian Koperasi dan UKM

Berdasarkan data perkembangan *Usaha Mikro (UMi)* Tahun 2016, yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan UKM terdapat sebanyak 60.853.578 atau 98,71 % unit usaha di Indonesia. Perkembangan *Usaha Mikro (UMi)* diklasifikasikan menurut segmentasi pasar, seperti golongan konsumen, tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan status sosial.

Berikut strategi pengembangan UMKM di Kabupaten Kulon Progo :

- 1.) Perbaiki sistem peraturan atau regulasi
- 2.) Meningkatkan promosi pengembangan UMKM

Strategi pengembangan UMKM dari segi perbaikan sistem peraturan atau regulasi di Kabupaten Kulon Progo yaitu telah ada formulasi (*perumusan*) kebijakan publik melalui perbaikan regulasi pada tingkat nasional, bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo untuk menetapkan peraturan yang lebih operasional, seperti menetapkan Peraturan Bupati (PerBup) No. 67/2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah di Dinas Koperasi dan UMKM, Peraturan Bupati (PerBup) No. 63/2010 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Instruksi Bupati No. 2/2010 tentang Peran serta Masyarakat dalam Menumbuhkan Koperasi dan UMKM. Sehingga terbentuknya formulasi kebijakan publik terhadap upaya pemerintah untuk melindungi UMKM dengan Peraturan Daerah (PERDA) No. 11/2011 dan Peraturan Bupati (PerBup) No. 25/2011.

Strategi UMKM pemerintah Kabupaten Kulon Progo dari segi meningkatkan pengembangan UMKM yaitu dengan memberikan kemudahan dalam perjanjian dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pemerintah mengeluarkan kebijakan afirmasi untuk mendukung pengembangan UMKM dengan gerakan Bela-Beli dan program kebijakan Toko Milik Rakyat (TOMIRA).

Selanjutnya, kebijakan meningkatkan promosi UMKM yang dilakukan antara lain:

- 1.) memberikan pelatihan sumber daya manusia (SDM),
- 2.) bantuan akses permodalan,
- 3.) bantuan peralatan,
- 4.) bantuan pemasaran.

Table.1.13. Indikator Kinerja Tahun 2013-2016

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Realisasi			Target Akhir Renstra 2016	Capaian s/d 2015 terhadap target akhir 2016
				2013	2014	2015		
1.	Nilai rata-rata volume usaha	<i>Volume usaha USP, KSP, dan Jumlah</i>	(Rp) Rupiah	476,33	477,08	482,54	459,80	104,94
2.	Koperasi yang difasilitasi	<i>Koperasi Sektor Rill</i>						

Sumber data :LAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2015

Berdasarkan indikator kinerja Tahun 2013-2016, yang bersumber dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kulon Progo bahwa pada tahun 2015 telah tercapai sebesar 104,94 % dengan target akhir renstra tahun 2016 senilai 459,80 juta. Sasaran meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM memiliki 2 indikator kinerja yaitu nilai rata-rata volume usaha koperasi serta pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi.

Perkembangan sektor koperasi dan UMKM mempunyai kontribusi yang cukup strategis terhadap penguatan struktur ekonomi di Kabupaten Kulon Progo. Ekonomi kreatif didesain untuk menjawab kemampuan masyarakat terkait ide-ide dan kreativitas untuk menciptakan inovasi produk baru. Kinerja pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mendorong sektor usaha dan koperasi sektor riil untuk dipacu agar lebih terarah dan terukur.

Kenaikan volume usaha dan koperasi yang difasilitasi berdasarkan indikator kinerja Tahun 2013-2016, dipicu oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Peningkatan kerjasama yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo bersama perbankan, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi dalam memberikan pendampingan dalam bentuk fasilitasi, pelatihan, pendidikan, bantuan peralatan, hibah, dan pembinaan sosial kemasyarakatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan Perjanjian Kerjasama terhadap pengelolaan koperasi dan usaha koperasi.
2. Kebijakan Takeover Alfamart tahap ke 2 kepada 4 Alfamart yang melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2011. Kebijakan ini berdampak terhadap kenaikan volume usaha 4 koperasi yang melakukan take over.
3. Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial (BANSOS) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada koperasi.

Table.1.14. Rencana Kinerja Tahun 2015

<i>Kinerja</i>				
<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi	458,23	482,54	105,31
	Pertumbuhan jumlah omzet UMKM yang difasilitasi	41,93	42,54	101,45

Sumber data :LAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2015

Rencana kinerja merupakan proses penyusunan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program kebijakan yang telah ditetapkan serta dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Komponen rencana kinerja terdiri dari sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Rencana kinerja ditetapkan melalui rencana pencapaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang berada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Sedangkan penyusunan rencana kinerja dilakukan melalui agenda penyusunan dan transparansi anggaran. Agenda penyusunan adalah komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapai pelaksanaan program kegiatan dalam tahun tertentu.

Berdasarkan rencana kinerja Tahun 2015, yang bersumber dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kulon Progo bahwa untuk indikator nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi mencapai 105,31 % dari target kinerja 458,23 % terealisasi sebesar 482,54 %. Sedangkan pertumbuhan jumlah omzet UMKM yang difasilitasi mencapai 101,45 % dari target kinerja 41,93 % terealisasi sebesar 42,54 %. Dinas Koperasi UMKM

Kabupaten Kulon Progo merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peranan dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat daerah melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), didukung oleh aparatur yang hadal dan professional dibidangnya. Indikator Rencana Kinerja Tahun 2015 ini ditunjang dengan program kegiatan pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM.

Table.1.15. Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015

<i>Keuangan</i>			
<i>Program</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Target</i>	<i>%</i>
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi KUMKM	Rp.138.100.600	Rp.134.088.125	97,09 %
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM	Rp.227.289.675	Rp.218.118.901	95,97 %

Sumber data :LAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2015

Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran program kegiatan yang diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Unsur-unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan (*financing*). Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

berguna untuk menyajikan ikhtisar sumber alokasi pendanaan dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

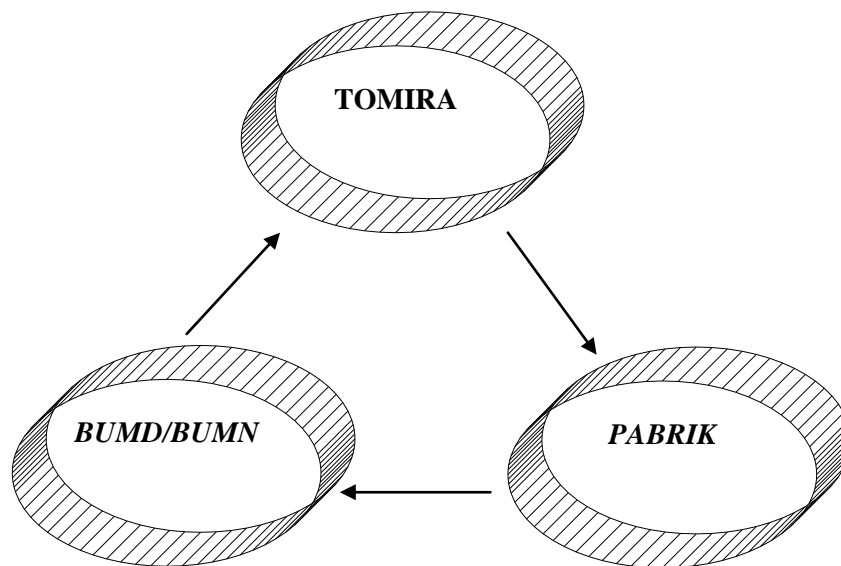
Berdasarkan realisasi anggaran kegiatan Tahun 2015, yang bersumber dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kulon Progo bahwa untuk keuangan mencapai 97,09 % dari target anggaran program Rp.134.088.125 terealisasi Rp.138.100.600. Indikator ini ditunjang dengan program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi KUMKM, melalui program kegiatan pelayanan badan hukum Koperasi khususnya untuk penyuluhan kelompok Prakoperasi. Sedangkan untuk program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM keuangan mencapai 95,97 % dari target anggaran program Rp. 218.118.901 terealisasi Rp. 227.289.675. Indikator ini ditunjang guna tercapainya kegiatan pengembangan usaha yaitu pengadaan peralatan bagi UMKM dan sewa stand pameran untuk kegiatan promosi inovasi produk Kelompok UMKM.

Program kebijakan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam memberikan perlindungan ekonomi kreatif berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2011 adalah Toko Milik Rakyat (TOMIRA). Toko Milik Rakyat (TOMIRA) berdiri pada 1 September 2014. Toko Milik Rakyat (TOMIRA) merupakan model pemberdayaan masyarakat yang berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kulon Progo.

Toko Milik Rakyat (TOMIRA) adalah program kemitraan pemerintah dengan perusahaan toko modern melalui sektor koperasi. Pemerintah daerah

menjalin kerjasama dengan unit usaha toko modern seperti Alfamart dan Indomaret untuk di *take over* menjadi sebuah program kebijakan yang berbentuk Toko Milik Rakyat (TOMIRA). Kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi UMKM lokal daerah melalui toko milik rakyat, diharapkan dapat memberikan sinergi yang positif kepada pelaku usaha UMKM.

Bagan.1.3. Pola Jaringan Kemitraan TOMIRA



Pola Jaringan Kemitraan Toko Milik Rakyat atau lebih dikenal dengan sebutan TOMIRA adalah sebuah toko modern hasil program kebijakan pemerintah daerah yang menjalin kemitraan antara koperasi dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) serta koperasi dengan PT Indomarco Prismatama (Indomaret). Toko Milik Rakyat atau TOMIRA merupakan jenis usaha BUMDes yang bergerak dalam bidang perdagangan. Sistem kemitraan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dengan Perusahaan (*Corporate*) bertujuan untuk melindungi keberadaan pasar tradisional dan industri UMKM lokal daerah agar mendapatkan ruang usaha secara adil.